

PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SOLIMANDUNGAN BARU KECAMATAN BOLAANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

VILLAGE FUND ALLOCATION ANALYSIS ON POVERTY AND COMMUNITY WELFARE IN SOLIMANDUNGAN BARU VILLAGE DISTRICT BOLAANG MONGONDOW DISTRICT

Oleh:

¹Pinus Magal

²George M.V. Kawung

³Mauna TH. B. Maramis

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email :

tigermagal@gmail.com

Abstrak : Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. Data yang digunakan adalah data sekunder dari pemerintah Desa Solimandungan Baru. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif dan analisis statistik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa masyarakat Desa Solimandungan Baru dalam lima tahun terakhir (2015-2019) tingkat kemiskinan terus menurun, sedangkan untuk tingkat kesejahteraan terus meningkat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat membawa dampak positif pada masyarakat yang ada pada desa tersebut.

Kata Kunci: ADD, Realisasi Dana Desa, Kemiskinan dan Kesejahteraan

Abstract: Currently, village Finance Management is one of the strategic issues the most talked about is that the entire village in Indonesia, amounting to 74,954 villages, is expected to receive a transfer of funds from the State budget and expenditure (APBN) for the development of the village. The purpose of this research is agaimana the influence of village fund allocation on poverty and community welfare in new Solimandungan village of Bolaang Sub-district Bolaang Mongondow. The data used is secondary data from the government of new Solimandungan village. The analytical techniques used in this study are data analysis in deskriptif and statistic analysis. Based on the research concluded that the new Solimandungan village has a very rapid economic growth with most of its search eye of the community is farmers. The level of poverty in the last five years (2015-2019) continues to decline, while the level of kesejahtraan continues to increase. The Village Fund Allocation (ADD) that is applied to the warmth and empowerment of the community brings a positive impact on the people in the village.

Keywords: ADD, village funds realization, poverty and prosperity

Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui desa, yang mengakibatkan peran desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-undang tersebut juga di jelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada Desa, sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2009). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang :

1. Bagaimana peran Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bagaimana peran Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow.

TINJAUAN PUSTAKA

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa: "Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)"

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sedarmayanti (2013:286) bahwa secara harfiah, kata pemberdayaan dapat diartikan yaitu : "Lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya. Empowerment merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, yang membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel. Permendagri RI

Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat 6 dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2014:80) dalam konsep pemberdayaan menampakkan dua kecenderungan yaitu : “Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Fahrudin (2012: 96-97) menyatakan bahwa : “Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenang, baik lahir maupun batin”.Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan.

Sementara itu, World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat pedesaan (Bank Dunia 2000). Badan Pusat Statistik (BPS), menjelaskan persentase kemiskinan pada tahun 2017 diperkotaan mencapai 1,26% (persen) sementara persentase kemiskinan di desa sebesar 13,47% (persen), ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih banyak di pedesaan.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut:

Transparan meliputi:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- c. Keterbukaan proses pengelolaan.
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.

Akuntabel meliputi:

- Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD.
- Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
- Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD.
- Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.

Partisipasif meliputi:

- Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan memanfaatkan hasil

Pemberdayaan masyarakat di ukur dengan empat indikator yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2014).

Adapun indikator pemberdayaan masyarakat meliputi: kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab. Peningkatan kesejahteraan di ukur menggunakan empat indikator menurut Soetomo (2014). Indikator kesejahteraan meliputi: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondouw Sulawesi Utara sedangkan objeknya yaitu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Solimandungan Baru dengan adanya Alokasi Dana Desa.

Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang hendak dikumpulkan adalah Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau narasumber dengan melakukan studi lapangan terhadap objek penelitian dilapangan yaitu, di Desa Solimandungan Baru dan Data sekunder, yaitu data statistik desa yang diperoleh dari Dokumen Desa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif dengan mengumpulkan data dari 5 tahun terakhir (2015-2019) kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis statistik yaitu analisis trenn untuk mengetahui perkembangan yang ada dari tahun ke tahun.

Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel variabelnya adalah sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa adalah dana penerimaan alokasi dana desa melalui APBDes di Desa Solimandungan Baru kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow dalam jutaan rupiah.
- Pemberdayaan masyarakat merupakan perubahan yang terjadi dimana menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel.
- Kemiskinan masyarakat adalah jumlah orang/keluarga miskin di desa.
- Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Alokasi Dana Desa**

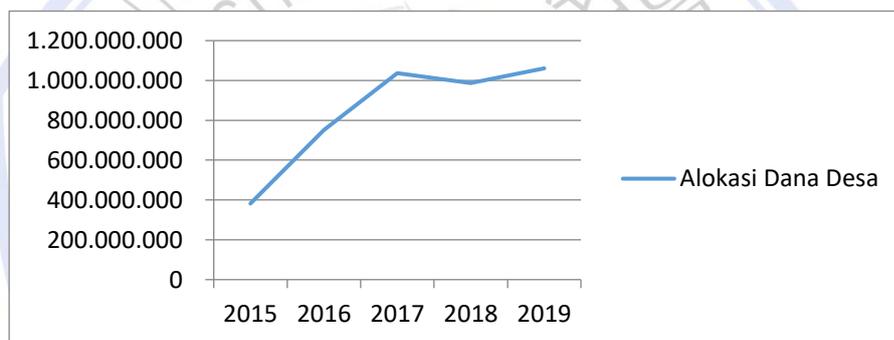
Alokasi dana desa di Desa Solimandungan baru dalam jutaan rupiah yang dialokasikan pada tahun 2015–2019 dengan total sebesar Rp. 4.217.062.378 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 678.786.479. Adapun alokasi dana desa mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2016 sebesar Rp. 369.529.336 dan terkecil pada tahun 2019 sebesar Rp. 74.306.000, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 49.633.000. Untuk data setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel4.1. Alokasi Dana Desa

No	Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)	Selesih Per Tahun
1	2015	382.030.521	-
2	2016	751.559.857	369.529.336
3	2017	1.036.144.000	284.584.143
4	2018	986.511.000	-49.633.000
5	2019	1.060.817.000	74.306.000
Total		4.217.062.378	678.786.479

Sumber : Statistik Desa Solimandungan Baru, data diolah (2020)

Pada tabel 1 dan gambar 2 menjelaskan peningkatan alokasi dana desa yang pada tiap tahunnya meningkat, peningkatan yang sangat pesat dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

**Gambar 2. Grafik Alokasi Dana Desa****Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk kesejahteraan masyarakat Desa Solimandungan Baru, pemerintah menyalurkan dana dengan total Rp. 2.952.303.618 dari tahun 2015 sampai 2019. Peningkatan dana terbesar dialami pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 307.117.572 dan terkecil pada tahun 2017 sebesar Rp. 71.831.705, sedangkan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 13.761.500. Adapun total peningkatan dana desa dari tahun 2015 sampai 2019 sebesar Rp. 479.206.577. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

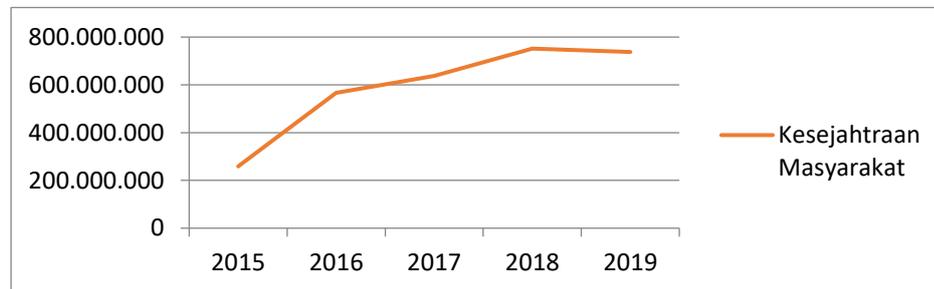
Tabel 2.Dana Kesejahteraan Masyarakat

No	Tahun	Kesejahteraan Masyarakat (Rp)	Selisih Per Tahun
1	2015	258.812.423	
2	2016	565.929.995	307.117.572
3	2017	637.761.700	71.831.705
4	2018	751.780.500	114.018.800
5	2019	738.019.000	-13.761.500
total		2.952.303.618	479.206.577

Sumber : Statistik Desa Solimandungan Baru, data diolah (2020)

Pada tabel 2. dan gambar 3 menjelaskan peningkatan alokasi dana desa yang pada tiap tahunnya meningkat, peningkatan yang sangat pesat dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Untuk Tingkat kesejahteraan masyarakat, terjadi peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2015 sampai 2016, sedangkan untuk tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan yang tidak terlalu jauh, penurunan ini terjadi karena pemerintah lebih fokus ke dana pemberdayaan masyarakat. Dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 2. Grafik Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

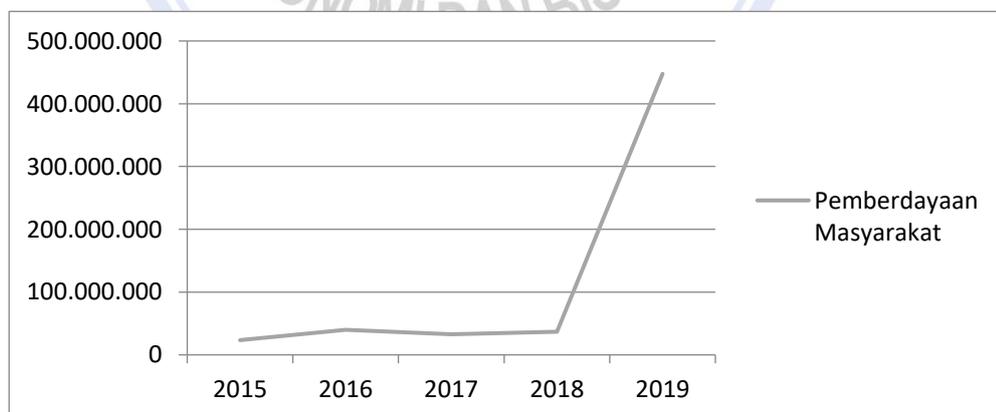
Adapun dana yang lain seperti dana pemberdayaan masyarakat di Desa Solimandungan Baru dari tahun 2015 – 2019 dengan total dana sebesar Rp. 580.759.763. Peningkatan dana pemberdayaan masyarakat tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 447.612.500 dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.781.500.

Tabel 3. Pemberdayaan Masyarakat

No	Tahun	Pemberdayaan (Rp)	Selisih Per Tahun
1	2015	23.454.763	
2	2016	40.064.000	16.609.237
3	2017	32.923.500	-7.140.500
4	2018	36.705.000	3.781.500
5	2019	447.612.500	410.907.500
total		580.759.763	424.157.737

Sumber : Statistik Desa Solimandungan Baru, data diolah (2020)

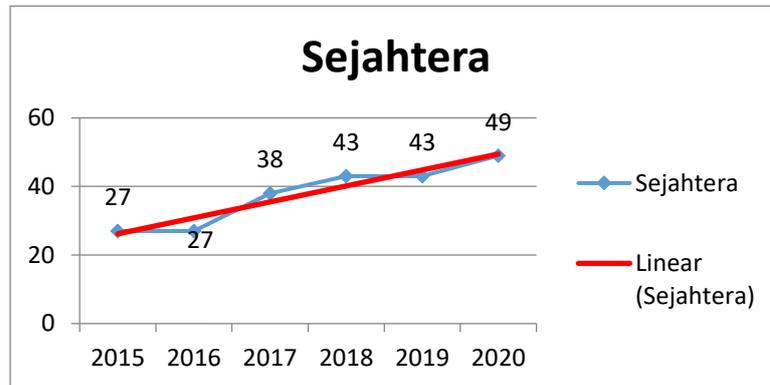
Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari alokasi dana desa, gambar 3 menjelaskan bahwa terjadi peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2019 sementara itu di tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan namun tidak naik secara tiba-tiba seperti tahun 2019.



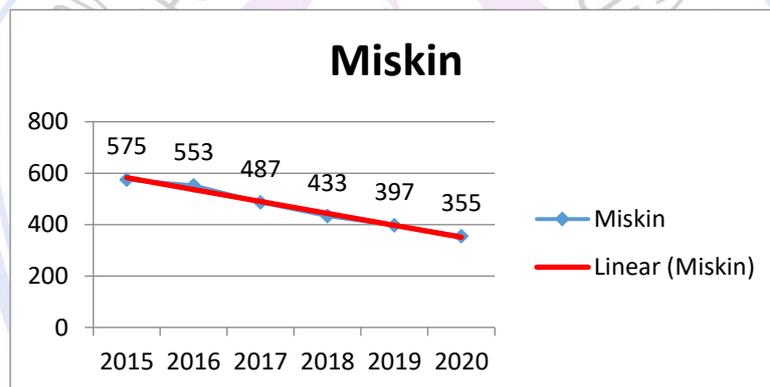
Gambar 4. Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat Kesejahteraan dan Kemiskinan per Orang

Tingkat Kesejahteraan masyarakat per orang atau jiwa mempunyai perbedaan pada setiap tahunnya, dibuktikan dengan kurva pada grafik yang meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2020 (Gambar 5). Pada Tahun 2015 Orang yang sejahtera adalah 27 jiwa selanjutnya terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 49 Jiwa. Sedangkan untuk Tingkat Kemiskinan terus berkurang pada tiap tahunnya mulai dari 575 jiwa pada tahun 2015 kemudian menjadi 355 jiwa pada tahun 2020 dibuktikan dengan terjadinya penurunan kurva grafik tingkat kemiskinan.



Gambar 5. Grafik Tingkat Kesejahteraan Orang



Gambar 6. Grafik Tingkat Kemiskinan Orang

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa, disimpulkan bahwa :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam lima tahun terakhir (2015-2019) sebesar Rp. 4.217.062.378, dana yang disediakan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sebesar Rp. 2.952.303.618. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat pemerintah menyediakan dana sebesar Rp. 580.759.763.
2. Desa Solimandungan Baru memiliki 304 Kepala Keluarga dan penduduk sebanyak 1035 penduduk. Dengan sebagian besar mata pencariannya dari masyarakat adalah petani.
3. Adapun tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir (2015-2019) terus menurun, sedangkan untuk tingkat kesejahteraan terus meningkat. Hal dibuktikan dengan berkurangnya jumlah tingkat kemiskinan pada desa tersebut.
4. Realisasi Dana Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat membawa dampak positif pada masyarakat yang ada pada desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan Realisasi dana desa oleh pemerintah dalam lima tahun terakhir (2015-2019), sehingga menyebabkan bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkurang jumlah orang/keluarga miskin pada desa tersebut.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah disimpulkan, peneliti mempunyai beberapa saran yaitu :

1. Untuk pemerintah desa agar meningkatkan sarana dan prasarana desa tersebut, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
2. Untuk Pemerintah dan Pihak atau Instansi terkait agar dapat melakukan sosialisasi tentang Realisasi Dana Desa sehingga masyarakat paham tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang menyangkut kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pada desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Fahrudin. 2012 Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung : Refika Aditama.

Mundir, 2016. Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai. Skripsi.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Penjelasan Mengenai Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Soetomo.2014. Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Prespektif Masyarakat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto. 2015. Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan- STKS.

Sugit, Agus. Tricahyono. 2009. Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media